

# ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Oleh:

SULTON

Email: [sulton@umpo.ac.id](mailto:sulton@umpo.ac.id)

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

## *Abstrak*

*Perubahan pada dasarnya menyangkut berbagai hal, mulai dari aspek fisik sampai perubahan kehidupan manusia. Perubahan kehidupan manusia atau terkait dengan lingkungan kehidupannya itulah yang kemudian disebut sebagai perubahan sosial. Sejumlah pertanyaan tersebut menggambarkan realitas sosial dengan berbagai dinamikanya sejalan dengan pilihan jawaban yang ditetapkan. Menjawab pertanyaan tersebut Charles F. Andrain mengemukakan klasifikasi pola perubahan sosial sebagai berikut :Pertama, Golongan revolusioner; mengambil pilihan perubahan sosial secara fundamental dan cepat dengan kekerasan secara meluas untuk menggugah massa yang pasif dan membalas tekanan elit yang menentang perubahan. Islam sebagai sistem keyakinan atau tata nilai memuat generalisasi atau konseptualisasi yang memberikan kerangka bagaimana seharusnya manusia berpikir dan berperilaku dalam hidup dan kehidupan bersama. Fanatisme kelompok atau golongan di internal umat Islam itu sendiri dengan klaim-klaim kebenarannya yang final telah mereduksi universalitas ajaran Islam itu sendiri, termasuk peluangnya untuk mengambil peran potensial dalam mendorong perubahan sosial*

**Keywords:** Islam, Perubahan Sosial,

## PENDAHULUAN

Banyak kajian menyimpulkan bahwa Islam adalah agama modern dan penuntun perubahan..Dalam banyak kasus Islam selalu dibenturkan dengan fenomena – fenomena perubahan yang sedang terjadi padasemua level kehidupan baik masyarakat desa maupun dunia internasional. Pada saat yang demikian Islam dipertanyakan eksistensi dan perannya. Tidak sedikit

kelompok masyarakat yang mulai skeptis dan menyangsikan kontribusi Islam terhadap perubahan sosial yang semakin dinamis ini bersamaan dengan kemajuan perkembangan teknologi. Dengan berbagai ajaran yang dianggap “konservatif” akan Islam menjadi ajaran yang mampu memberikan alternative, daya dorong atau bahkan akan menjadi penghambat atas perubahan sosial yang sedang melaju.

## **MEMAHAMI MAKNA PERUBAHAN SOSIAL**

- Renald Kasali dalam bukunya yang mapudengan pernyataan yang sangat menarik bahwa “perubahan dalam kehidupan ini (termasuk perubahan sosial) adalah suatu keniscayaan”. Perubahan selalu berlangsung pada komunitas dan stratifikasi masyarakat manusia, setiap saat dimanapun mereka berada dan berkehidupan. Hampir tidak ada masyarakat yang statik, karena kehidupan pada dasarnya sejumlah proses gerak maju yang didorong oleh warga masyarakatnya. Perubahan merupakan proses kehidupan itu sendiri, yang dapat dimanifestasikan sebagai kehendak menempuh perjalanan kehidupan (Judistira K. Garna, 1992:7).
- Perubahan pada dasarnya menyangkut berbagai hal, mulai dari aspek fisik sampai perubahan kehidupan manusia. Perubahan kehidupan manusia atau terkait dengan lingkungankehidupannya itulah yang kemudian disebut sebagai perubahan sosial. Karenanya perubahan sosial hanya dapat difahami dari konteks tata kehidupan masyarakat dalam lingkupnya yang luas. Menurut

Henry Pratt Fairchild, (1962:227) perubahan sosial adalah variasi modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk sosial.Selanjutnya Wilbert Moore (1974:4,6) menegaskan bahwa, perubahan sosial bukanlah suatu gejala masyarakat modern an-sich, melainkan sesuatu yang universal dalam pengalaman hidup manusia. Dalam kehidupan masyarakat yang kian mengglobal, perubahan jelas akan diposisikan sebagai kebiasaan karena perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang cepat sehingga krisis kehidupan di belahan bumi lain akan berakibat ke bagian lainnya.

## **MEMAHAMI POLA PERUBAHAN SOSIAL**

- Terkait dengan perubahan sosial Charles F. Andrain (1992:39-42) mengajukan sejumlah pertanyaan menarik. Bagaimana suatu perubahan itu terjadi ?
- Apakah berlangsung secara alamiah atau harus direncanakan secara sadar ?
- Apakah melalui media kekerasan atau taktik-taktik non kekerasan ?
- Sejumlah pertanyaan tersebut menggambarkan realitas sosial dengan berbagai dinamikanya sejalan dengan

pilihan jawaban yang ditetapkan. Menjawab pertanyaan tersebut Charles F. Andrain mengemukakan klasifikasi pola perubahan sosial sebagai berikut :

- *Pertama*, Golongan revolusioner, mengambil pilihan perubahan sosial secara fundamental dan cepat dengan kekerasan secara meluas untuk menggugah massa yang pasif dan membalas tekanan elit yang menentang perubahan. Golongan ini biasanya mengusahakan perubahan yang cukup luas dan mendasar menyangkut keyakinan-keyakinan dasar, struktur, perilaku individu dan sikapnya, serta kebijakan. Bagi golongan revolusioner, sistem keyakinan berfungsi sebagai peta pengenal yang menunjukkan arah baru yang harus diikuti oleh masyarakat.
- *Kedua*, Golongan reformis, mengasumsikan perubahan secara bertahap terbatas terkait keempat bagian sistem politik/sosial yang ada. Sebagai ilustrasi, terkait sistem keyakinan dan tata nilai kemungkinan besar tidak dirubah secara mendasar melainkan sebatas penafsiran ulang tata nilai yang ada. Selain itu golongan ini menawarkan perubahan secara bertahap dalam berbagai aspek

mulai dari perubahan perilaku melalui sistem hukum, perubahan sistem stratifikasi menuju persamaan lebih besar dalam memperoleh kesempatan, perubahan sistem pemerintahan menuju desentralisasi, perubahan struktur dasar masyarakat mulai dari hak pilih, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan hukum dll.

- *Ketiga*, Golongan puritan dan quaker. Golongan puritan mengasumsikan perubahan sosial hanya dapat dilakukan dengan pengorganisasian dan kekerasan yang lebih besar. Pola ini diyakini oleh golongan puritan arena sumber kejahatan itu bersemayam dalam diri manusia, sehingga diperlukan organisasi yang kuat dan tindakan yang tegas untuk mengendalikan kecenderungan manusia yang jahat dan korup. Sedangkan golongan quaker berasumsi bahwa lembaga-lembaga yang koruplah yang menimbulkan kejahatan di dunia, karena itu mereka percaya bahwa melalui komuni dengan “Cahaya Ilahi” dari dalam orang dapat membebaskan diri dari ikatan-ikatan organisasi mereka, dengan selalu siap menerima “Cahaya Ilahi” dapat membentuk suatu komunitas dengan semangat cinta

altruistik (mengutamakan kepentingan orang lain) sehingga model ini berharap dapat membawa perubahan-perubahan fundamental dan spontan tanpa kekerasan dalam masyarakat yang korup.

## LEGITIMASI ISLAM ATAS PERUBAHAN SOSIAL

- Kalayak umum sering berasumsi bahwa suatu perubahan sosial hanya didorong dan ditentukan oleh keberadaan individu yang kuat dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan mendasar yang meletakkan dan mendorong perubahan itu sendiri. Meski tidak sepenuhnya salah, sejarah kehidupan manusia memberikan informasi kepada kita a d a n y a sumber-sumber yang mendorong terjadinya perubahan sosial, mulai dari keberadaan sistem keyakinan/ tata nilai, organisasi dan sistem sosial, sistem politik, konflik sosial atau politik dan ilmu pengetahuan atau penemuan teknologi.
- Mengkaitkan Islam dan perubahan sosial adalah diskursus yang sangat menarik, karena Islam sebagai sistem keyakinan dan tata nilai seringkali dipersepsi sebagai doktrin yang statis dan *status quo* atas berbagai agenda

kehidupan yang ada. Ini bisa kita saksikan dari orientasi penghayatan dan amalan agama sebagian besar umat Islam yang masih terkemas dalam bentuk ibadah *mahdhoh* an-sich. Sistem keyakinan dan tata nilai Islam seperti final dalam konstruksi ritual keagamaan vis a vis dengan dinamika kehidupan manusia dengan logikanya sendiri, padahal Islam (baca: Al-Qur'an dan Al-Hadist) diturunkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai *hudanlinnas*, petunjuk bagi kehidupan manusia bagi dalam konteks hubungan vertikalnya dengan Allah SWT maupun hubungan horizontalnya dengan sesama manusia dan alam semesta ini.

- Dari perspektif teologi-ideologis, Islam sebagai sistem keyakinan atau tata nilai memuat generalisasi atau konseptualisasi yang memberikan kerangka bagaimana seharusnya manusia berpikir dan berperilaku dalam hidup dan kehidupan bersama. Suatusistem keyakinan atau tata nilai yang mampu memberikan penjelasan dan sekaligus justifikasi terhadap tertib sosial-politik yang ada atau yang didambakan termasuk strategi untuk merealisasikannya. Juga memuat seperangkat

- asumsi dasar-normatif atau empiris mengenai sifat atau tujuan manusia dan masyarakatnya yang bisa dipakai sebagai landasan untuk menjelaskan atau mempertimbangkan kondisi manusia sebagai pendorong untuk mengembangkan/mempertahankan tertib sosial-politik yang didambakan
- Dalam doktrin keberagamaan Islam terdapat apa yang lazim disebut sebagai *religious imagery* atau gambaran masa depan kehidupan yang kelak sampai pada kesejahteraan dan kebahagiaan sejati (Sunyoto Usma, 1997:2). Islam juga memberikan arahan (rambu-rambu) apa yang harus dilakukan manusia untuk mewujudkan keadaan ideal tersebut. Dalam konteks itulah ajaran Islam sebenarnya bukansebuah elemen pasif dalam proses sosial, melainkan elemen aktif dalam proses sosial termasuk perubahan sosial. Islam sebagai agama dengan misi universal, yang diturunkan oleh Allah SWT untuk memberi rahmat bagi alam semesta alam (*rahmatan li al- alamin, QS, 21:107*) telah memberikan pandangan yang komprehensif tentang eksistensi Tuhan, manusia dan alam semesta. Dalam konteks kehidupan bersama (baca: sosial) salah satu misi besar Islam adalah membangun masyarakat menjadi "*khaira ummah*" yaitu umat yang menyuruh berbuat makruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah SWT (QS. Ali Imran, 3:110). Konsep "*khaira ummah*" bukanlah sesuatu yang *taken for granted*, yang pasti datang dengan sendirinya, otomatis tercapai karena sudah ber-Islam, tanpa adanya pembaharuan (baca: perubahan) masyarakat (baca: sosial) secara terus menerus sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar Ra'd, 13:11 bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila mereka tidak mengubahnya sendiri.
  - Tafsir dari QS. 3:110 tersebut seperti memberikan arah, bahwa siapa saja (individu, kelompok, bangsa atau negara) yang mengaku dirinya muslim, maka mereka harus merepresentasikan diri dan kelompoknya sebagai '*khaira ummah*'. Artinya dalam hal ini ada keniscayaan yang melakat dalam diri dan kebersamaan umat Islam untuk terus bergerak, berubah dan berkembang menuju terwujudnya '*khaira ummah*' dalam konteks kehidupan yang luas, baik pada aras politik, ekonomi, sosial, budaya maupun lainnya.

## BEBERAPA TANTANGAN

### PERUBAHAN SOSIAL

- Sebagaimana diketahui bahwa di dalam ajaran Islam sebenarnya tertuang ide-ide yang potensial memacu perubahan sosial. Akan tetapi mengapa ide-ide semacam itu seringkali sulit muncul ke permukaan? Meski tidak mudah untuk menjawabnya, sebagian sebenarnya berkaitan dengan keberadaan individu umat Islam berikut pandangan, sikap dan persepsinya dan sebagian lainnya terintegrasi dalam struktur interaksi sosial yang dikembangkan oleh umat itu sendiri (Sunyoto Usman, 1997:5).
- Tafsir atas sistem keyakinan dan tata nilai Islam sebagai doktrin yang statis dan kaku oleh umatnya, bisa menjadi bahaya tersendiri apabila dipergunakan untuk meligitimasi *status quo* dari praktik sosio-politik yang eksploitatif dan manipulatif. Gejala kolonialisme, imperialisme, kapitalisme dan liberalisme internal yang ditunjukkan melalui praktik-praktik eksploitasi dan manipulasi umat yang berlindung dibalik baju agama. Fenomena elite umat atau sekelompok kecil umat berkepentingan yang seringkali tergoda memanfaatkan peluang ini untuk memenangkan kompetisi, penguasaan atau mempertahankan kepemilikan adalah contoh dari kecenderungan dimaksud
- Fanatisme kelompok atau golongan di internal umat Islam itu sendiri dengan klaim-klaim kebenarannya yang final telah mereduksi universalitas ajaran Islam itu sendiri, termasuk peluangnya untuk mengambil peran potensial dalam mendorong perubahan sosial. Elemen lainnya yang sering menghambat perubahan sosial adalah budaya masyarakat yang patrimonialisme yaitu suatu bentuk budaya tradisional yang melanggengkan dominasi sang patron atas kliennya. Dalam konstruksi budaya masyarakat yang demikian, keputusan-keputusan krusial berikut tafsirnya berada dalam kontrol langsung sang patron, termasuk para pemuka agama. Kuatnya cengkaman para patron tersebut memberi kesempatan besar kepada mereka untuk memanipulasi keadaan guna memenuhi ambisi dan kepentingan sosial-politiknya, jauh dari potret ideal yang disediakan oleh sistem keyakinan atau tata nilai termasuk dalam hal ini sistem keyakinan dan tata nilai Islam. Dalam hal ini terjadi kecenderungan praktek kesewenang-wenangan yang absolut dan kestabilan yang subyektif. Inisiatif, prakarsa, kreatifitas atau

inovasi hanya menemukan pintunya untuk diakomodir sepanjang tidak mengganggu *privillage* dan eksistensi kelompok dominan.

- Sangat boleh jadi, sebagai respon atas arus perubahan umat atau rakyat juga diajak bicara dalam mengambil keputusan, tetapi sesungguhnya hanyalah simbol formulasi keputusan yang merakyat atau demokratis. Akibatnya doktrin agama yang memberikan dorongan agar umat manusia menjadi aktif dan tidak tinggal diam sangat sulit direalisasikan. Demikian juga doktrin agama yang memberi amanat kepada setiap individu umat islam untuk bertindak selaku *khalifa fil ard*, bertanggungjawab atas hidup dan kehidupannya juga menjadi sulit diperankan dan diwujudkan. Akibatnya muncul stigma negatif seolah doktrin agama hanya untuk wilayah kehidupan ketuhanan (baca: akhirat) sedangkan kehidupan manusia dalam dunia ini menjadi tafsir bebas sang manusia.

## **PENUTUP**

- Ketika politik dimaknai sebagai perjuangan meraih kekuasaan dan kendali dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat, maka politik bukanlah proses yang statis,

karena perjuangan meraih kekuasaan, pembuatan dan penerapan keputusan itu menyangkut kerjasama dan persaingan, yang keduanya signifikan mendorong perubahan sosial. Dalam proses politik, dimungkinkan diantara pelaku mengambil jalan kerjasama untuk mewujudkan tuntutan mereka. Masing-masing bisa jadi membuka diri untuk saling melakukan tawar-menawar, mempertemukan dan menyesuaikan berbagai tuntutan yang tadinya berbeda kedalam titik temu perubahan kebijakan (perubahan sosial) yang disepakati.

- Sementara pada sisi lain konteks persaingan juga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Beragam tuntutan yang berbeda dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, membuat para pemimpin (pengambil kebijakan) harus bekerja keras untuk menentukan tuntutan mana yang secara moral harus dipenuhi karena dianggap baik dengan mengelola sumberdaya yang terbatas tersebut. Jika politik identik dengan *who gets what, when and how*, maka keputusan politik tersebut secara berkelanjutan akan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Beberapa kelompok mungkin hanya memperoleh sedikit hasil akibat

sumberdaya yang sedikit, sementara kelompok lainnya memperoleh manfaat politik yang maksimal, sehingga mendorong mereka saling bersaing dan berkonflik. Hal ini dapat mendorong para elite membuat perubahan (baca: perubahan sosial) berbagai aspek sistem, misalnya: isi kebijakan, orang yang berkuasa, struktur-struktur pemerintah, bahkan masyarakat yang dikenai kebijakan.

- Tekanan kelompok yang menguasai sumberdaya besar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dapat mendorong elite untuk menempuh jalan paksa dalam rangka menekan konflik anti pemerintah. Tetapi ketika elite politik kehabisan sumberdaya sekaligus kemauan untuk menghadapi tekanan tersebut, sementara kelompok penekan pada saat yang sama dapat mengelola sumberdaya dan kemauannya secara efektif dimungkinkan terjadi kerjasama atau tawar menawar, sehingga membuka kemungkinan terjadinya perubahan dalam sistem politik. Itulah asumsi teoritis dan empiris sosio-politik di tengah masyarakat, yang sangat disayangkan seringkali bergerak berdasar skenario pragmatis, bukan kendali ideologi negara yang disepakati, apalagi pertimbangan

sistem keyakinan dan tata nilai Islam. Akibatnya perubahan menjadi kehilangan ruh sekaligus arahnya, kecuali untuk kalkulasi pragmatis belaka bernama kekuasaan. Hajatan politik nasional berupa pileg dan pilpres pada paro awal tahun 2014 ini kiranya tidak jauh dari asumsi pragmatis tersebut, sehingga jauh panggang dari api untuk berharap terjadinya perubahan sistem politik yang lebih baik dan ideal, karena proses interaksi politik yang sedang digelar dibangun dalam kendali pragmatisme bukan berdasar sistem keyakinan dan tata nilai luhur baik sebagai bangsa (red. Pancasila) maupun sistem keyakinan dan tata nilai luhur lainnya (termasuk agama).

- Jika pemilu diasumsikan sebagai panggung kedaulatan rakyat, maka dapat dikatakan pemegang kendali/kuasa untuk menentukan arah perubahan politik kedepan adalah rakyat. Dalam doktrin Islam dengan tegas dinyatakan “Wajiblah bagi penguasa (dalam kasus pemilu ada di tangan pemilih) untuk mengangkat seseorang yang terbaik untuk mengurus urusan kaum muslim (QS. An Nisaa 58- 59)”. Selanjutnya “Penguasa (dalam kasus pemilu ada di tangan pemilih) yang

tidak memilih orang terbaik, tetapi memilih seseorang karena hubungan famili, pernah menolong, sederhana, sealiran, seorganisasi, serumpun, suap/jasa, dendam atau tidak senang kepada yang berhak, sesungguhnya penguasa (dalam kasus pemilu adalah pemilih) tersebut telah mengkhianati Allah, Rasul dan Kaum Mu'min (QS. Al Anfal, 27-28). Dan "Setiap diri manusia (dalam kasus pemilu adalah pemilih) akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya (QS. Al Muddatstsir, 38)". Inilah beberapa contoh bagaimana sistem keyakinan dan tata nilai Islam mengatur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrain, Charles F. Andrain, 1992., *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Tiara Wacana: Jogjakarta. Fairchild, Henry Pratt ed., 1962., *Dictionary of Sociology and Related Science*, New Jersey: Littlefield, Adams & co.
- Garna, Judstira K., 1992., *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Program Pasca Sarjana Univ. Padjajaran: Bandung. Moore, Willbert E., 1974., *The Social Change*, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Usman, Sunyoto., 1997., *Dakwah dan Perubahan Sosial*, Makalah Orasi Ilmiah di Universitas Muhammadiyah: Ponorogo.

